TINJAUAN BUKU

SASTRA

Membentangkan Isu Sejarah Sastra Indonesia

E. Ulrich Kratz (peny.), *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), xxxix + 980 halaman (termasuk indeks)

Maman S. Mahayana
Universitas Indonesia

Kapankah kesusastraan Indonesia lahir? Inilah pertanyaan yang diajukan Ajip Rosidi yang kemudian dijadikan judul bukunya.¹ Sesungguhnya, pertanyaan Ajip Rosidi itu tidaklah datang secara serta-merta. Ada persoalan yang melatarbelakangi-nya dan persoalan itu berkulat di seputar batas awal munculnya karya-karya sastra Indonesia yang memperlihatkan ciri-ciri kemodernan. Umar Junus (1960) mengatakan bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928.

Dengan alasan, bahwa "sastra ada sesudah bahasa ada" maka kehadiran sastra Indonesia ditandai dengan kelahiran bahasa Indonesia, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan kesepakatan untuk mengakui "bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Sementara itu, A. Teeuw menempatkan kelahiran sastra Indonesia sekitar tahun 1920. Alasannya,

Pada ketika itulah para pemuda Indonesia untuk pertama kali mulai menyatakan perasaan dan ide yang pada dasarnya berbeda daripada perasaan dan ide yang terdapat masyarakat setempat yang tradisional dan mulai berbuat demikian dalam bentuk-bentuk sastra yang pada pokoknya menyimpang dari bentuk-bentuk sastra Melayu, Jawa, dan sastra lainnya yang lebih tua, baik lisan maupun tulisan. [...]

¹ Lihat Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* (Jakarta: Gunung Agung, 1985).

Pada tahun-tahun itulah untuk pertama kali para pemuda menulis puisi baru Indonesia (Teeuw 1980: 15–18).

Boleh jadi lantaran adanya perbedaan itulah, maka Ajip Rosidi menyodorkan gagasan lain yang berbeda dengan Umar Junus dan Teeuw. Lalu, bagaimana dengan gagasan Ajip Rosidi sendiri? Menurutnya, masalah *kesadaran kebangsaan* yang seharusnya dijadikan patokan. Dengan patokan ini maka lahirnya kesusastraan Indonesia modern adalah awal 1920-an. Alasannya, pada tahun-tahun itulah para pemuda Indonesia, seperti Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, dan Sanusi Pane, mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah *Jong Sumatra*. Demikian juga kumpulan sajak Muhammad Yamin, berjudul *Tanah Air*, terbit pula pada tahun 1922 (Rosidi 1985: 6).

Semua pendapat itu belakangan ini digugat kembali. Apa yang dilontarkan Umar Junus, Teeuw, dan Ajip Rosidi, sesungguhnya menafikan keberadaan sastra yang muncul di media massa atau yang belum tercetak dalam bentuk buku. Akibatnya, sastra yang secara sosiologis hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sebagaimana yang dapat kita cermati dari karya-karya yang dimuat di berbagai media massa yang terbit akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, luput dari catatan sejarah. Bahkan, lebih dari itu, sejumlah nama yang secara signifikan memberi kontribusi bagi pertumbuhan kesusastraan Indonesia, ikut pula ditenggelamkan. Kondisi inilah yang secara tragis menimpa kesusastraan Indonesia yang ditulis oleh para sastrawan peranakan Tionghoa. Karya-karya mereka secara sepihak dikategorikan sebagai karya-karya sastra Melayu rendah atau yang oleh pihak pemerintah kolonial Belanda disebut sebagai “bacaan liar” (Nio Joe Lan 1962; Salmon 1985; dengan Suryadinata [peny.] 1996; Marcus A.S. dan Benedanto 2000).

Lalu, apa pula kaitannya masalah tersebut dengan buku yang disusun Kratz ini? Justru dalam hal itulah, masalah yang segera muncul ketika kita mencer-mati buku ini adalah penempatan artikel pertama. Meskipun Kratz beralasan bahwa esai yang dipilihnya “bukanlah karya-karya yang melibatkan diri, misalnya, dalam diskusi tentang tanggal lahir sastra Indonesia ...” lalu mengapa ia mengawali himpunan artikel dalam buku ini dengan “Poatoesan Congres Pemoeda Pemoeda Indonesia” yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan bukan hasil kongres Budi Utomo atau artikel lain yang pernah muncul dalam media massa awal abad ke-20? Demikian juga, penjelasan mengenai Sumpah Pemuda yang terdapat pada artikel kedua “Sumpah Indonesia Raja” yang ditulis Muhammad Yamin, menunjukkan pilihan Kratz yang terkesan hendak menempatkan awal kesusastraan Indonesia modern pada 28 Oktober 1928. Jadi, penempatan kedua artikel itu pada awal bukunya niscaya bukan tanpa pertimbangan. Oleh karena itu, kita boleh berasumsi bahwa secara tersirat gagasan Kratz

patut dicurigai sejalan dengan gagasan Umar Junus dan belakangan Nugroho Notokusanto perihal awal lahirnya kesusastraan Indonesia. Padahal yang terjadi sebelum itu, terutama yang terekam dalam surat-surat kabar dan majalah akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebagaimana yang telah disebutkan, merupakan bukti bahwa sastra Indonesia telah tersebar di berbagai media massa pada masa itu. Beberapa artikel itu menunjukkan bahwa pemikiran mengenai sastra Indonesia sebagai bagian dari kultur masyarakatnya telah berkembang semarak dan menjadi bahan pemikiran para pengarang dan kaum terpelajar kita.²

Demikianlah, penempatan kedua artikel itu saja sudah mengundang masalah. Jika memang Kratz hendak memilih sejumlah sumber sejarah sastra Indonesia abad ke-20, maka setidaknya-tidaknya ia mesti menampilkan artikel lain yang muncul awal abad itu, dan hal itu tidak sulit dicari karena memang bertebaran dalam surat kabar atau majalah waktu itu.

Di luar persoalan itu, secara keseluruhan buku ini, harus diakui, laksana sebuah rangkaian gagasan estetik mengenai sastra Indonesia abad ke-20. Sebuah panorama pemikiran yang coba mengangkat berbagai problem kesusastraan Indonesia dalam rentang waktu hampir satu abad. Dalam konteks itu, tampak jelas bahwa kesusastraan tidak sekadar produk imajinatif-estetik, melainkan juga sebagai bentuk lain dari pergulatan pemikiran yang merekam keterlibatannya dalam berbagai aspek sosio-kultural zamannya.

Dalam kata pengantarnya, E. Ulrich Kratz mengandaikan bahwa sumber terpilih sejarah sastra Indonesia abad ke-20 itu berisi berbagai pemikiran dan isu penting yang kerap dibicarakan dalam sejarah sastra Indonesia. Tentu saja yang dilakukan doktor pengajar Universitas London itu bukan tidak mengandung problem. Ia berhadapan dengan artikel-artikel lain yang terpaksa disingkirkan. Itulah konsekuensi yang harus diterima saat ia memilih, memilih, dan kemudian menyusunnya hingga terbentang arus pemikiran yang pernah hingar-bingar mewarnai dinamika perjalanan sastra Indonesia.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan Kratz sungguh merupakan sumbangan berarti bagi usaha penelusuran berbagai pemikiran mengenai kesusastraan Indonesia. Ke-97 tulisan yang dihimpun dalam buku ini, selain pernah dimuat dalam berbagai publikasi (buku, majalah, surat kabar, kertas kerja atau makalah) dalam rentang waktu 1928–97, juga

² Periksa sejumlah artikel dalam *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (terbit di Surabaya, edisi pertama, 12 Januari 1856); *Bientang Timoor* (terbit pertama kali di Surabaya, 4 Januari 1865; 3 Januari 1866 ejaan nama majalah itu diganti menjadi *Bintang Timor*); *Pembrita-Bahroe* (1881–96); *Harian Tjahaja Moelia* (1883–4), serta sejumlah surat kabar lain yang terbit akhir abad ke-19; Lihat juga Suripan Sadi Hutomo (1995: 10–28).

merupakan artikel yang mengangkat isu-isu penting yang beberapa di antaranya justru berkembang menjadi polemik. Oleh karena itu, kita dapat menerima jika Kratz menyebut artikel-artikel itu sebagai "sumber terpilih."

Sementara itu dalam pemilihan tema, Kratz tampak melakukannya secara sangat hati-hati. Sejumlah masalah yang pernah menjadi isu penting, berhasil dibentangkan secara tematis. Ia berusaha menjaga benang merahnya, meski di sana-sini tampak sistematikanya tak begitu lempang.³ Lazimnya permasalahan dalam menghimpun tulisan yang berlimpah, selalu muncul di seputar kriteria dan alasan pemilihan. Setelah pemuatan artikel pertama dan kedua yang mengangkat ihwal Sumpah Pemuda, misalnya, Kratz memasukkan tulisan Nur Sutan Iskandar, "Peranan Balai Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Indonesia," yang pernah dimuat dalam *Pustaka dan Budaya* (No. 8, Th. II, 1960). Jika hendak mengangkat Balai Pustaka, mengapa tulisan K. A. H. Hidding mengenai Balai Pustaka, dilupakan.⁴ Jika alasannya karena penulisnya bukan orang Indonesia, tulisan K. St. Pamuntjak (?), *Balai Pustaka Sewadjarja* (1948), jauh lebih menggambarkan peran Balai Pustaka dalam penerbitan majalah, buku sastra, termasuk terjemahan, dan terutama dalam melahirkan sastrawan kita.

Hal lain juga terjadi pada pemilihan artikel dari majalah *Poedjangga Baroe*. Tulisan Armyn Pane, "Kesoesastraan Baroe I dan II" misalnya, tidak jelas dasar pemuatannya karena artikel Armijn Pane itu sebenarnya terdiri dari empat tulisan.⁵ Jika landasan pemilihan artikel itu: "karya-karya yang bergelut dengan soal perumusan kriteria dan sifat-sifat sastra Indonesia" (h. xvi), lalu mengapa empat artikel Amir Hamzah, "Kesoesastraan I-IV"⁶ atau empat artikel Alisjahbana "Poeisi Indonesia Zaman Baroe I-IV"⁷ yang

³ Dalam urutan pemuatan berbagai tulisan itu, kesan yang segera muncul adalah bahwa artikel-artikel itu disusun secara kronologis. Secara garis besar, sesuai dengan judul buku ini, *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad XX*, urutannya adalah sebagai berikut: Tahun 20-an, Zaman Pujangga Baru, Zaman Jepang, Angkatan 45, Tahun 1950-an, Angkatan 66, Tahun 1970-an, dan Tahun 1980-an. Dalam kenyataannya, ada sejumlah artikel yang disusun secara tidak kronologis, sebagaimana yang akan kita lihat dalam pembicaraan berikutnya.

⁴ Tulisan-tulisan lain mengenai Balai Pustaka, periksa B. Th. Brondgeest, G. W. J. Drewes, T. J. Lekkerkerker (1930 ?); "Apakah Balai Pustaka?: Kitab Peringatan Timbang Terima Pimpinan Balai Pustaka 12 Maart 1927"; "Apakah Balai Poestaka" (Pengantar bagi lid-lid Congres Bestuur Boemipoetera jang ke III waktoe mengoendjoengi Balai Poestaka (1930).

⁵ Tulisan Armijn Pane, "Kesoesastraan Baroe" dimuat secara berturut-turut dalam *Poedjangga Baroe*, No. 1 (Juli), 2 (Agustus), 3 (September), 4 (Oktober), Th. I, 1933.

⁶ Dimuat bersambung secara berturut-turut dalam *Poedjangga Baroe*, No. 12 (Juni) Th. I, 1933, No. 13 (Juli), 14 (Agustus), 15 (September), Th. II, 1934.

⁷ Dimuat bersambung dalam *Poedjangga Baroe*, No. 14 (Agustus), No. 15 (September), 17 (November), 18 (Desember), Th. II, 1934.

dimuat bersambung dalam *Poedjangga Baroe* periode yang sama, diluputkan?

Soalnya, artikel Amir Hamzah secara jelas hendak menegaskan konsep kesusastraan Indonesia yang tidak dapat lepas dari pengaruh kesusastraan "tanah luar," meskipun yang dimaksud dengan "tanah luar" itu adalah kesusastraan Timur:

Kesoesasteraan Indonesia ini banjak dipengaroehi oleh kesoesasteraan tanah loear, tanah jang hampir dengan kepoelauan Indonesia. Tambahan poela tanah jang mengelilingi kepoelauan Indonesia ini kaja dalam ilmoe sastra.

Begitu pula artikel Alisjahbana, justru menjadi dasar pemikirannya mengenai kriteria puisi lama dan baru. Dalam konteks kebudayaan, ia juga bersambungan dengan artikel Alisjahbana "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru" yang lalu berkembang menjadi Polemik Kebudayaan. Jadi, timbul pertanyaan, atas dasar apa artikel Amir Hamzah dan Alisjahbana itu disisihkan?

Persoalan lain menimpa pula artikel "Poedjangga Baroe". Mengapa bagian Susunan Redaksi, Rupa, dan Langganan yang terdapat dalam artikel itu dihilangkan? Boleh jadi masalahnya akan lain jika Kratz mengambil artikel aslinya (*Poedjangga Baru*, 1, Juli 1933) dan tidak berdasarkan *Prospectus* yang terdapat dalam buku yang disusun C. Hooykaas (1947). Kalaupun itu pilihan Kratz, seyogianya ada penjelasan serba sedikit mengenai adanya perbedaan antara artikel yang dimuat *Poedjangga Baroe* dengan *Prospectus* yang terdapat dalam buku Hooykaas.

Mengherankan bahwa Kratz tidak begitu tegas menjelaskan kriteria pemilihan sejumlah artikel yang disusunnya itu. Ini berbeda dengan apa yang dilakukannya dalam "Pendahuluan" buku *Bibliografi Karya Sastra Indonesia dan Majalah* (1988: 21–43) yang pertanggungjawabannya begitu meyakinkan. Masalahnya menjadi lebih rumit jika kita mencoba menyisir kembali artikel-artikel yang bertebaran dengan rentang waktu yang sangat panjang itu, dan sesungguhnya, secara keseluruhan, masalah inilah yang menjadi titik rawan kriteria penyusunan yang dilakukan Kratz. Bagaimanapun juga, pertanggungjawaban merupakan hal yang penting, meski penyusun mempunyai hak penuh atas pilihannya. Jika saja Kratz memberi keterangan atas pemilihan artikel-artikel yang dihimpunnya, termasuk urutan pemuatannya,⁸ niscaya kesan subyektif dapat dihindarkan.

⁸ Ada kesan Kratz hendak mengurutkan pemuatan esai atau artikel dalam buku ini secara tematik kronologis, dimulai dengan "Sumpah Pemuda" dan diakhiri dengan artikel Putu Wijaya "Pram" (1997), yang mengangkat seputar kontroversi pemberian hadiah Magsaysay kepada Pramoedya Ananta Toer. Tetapi ternyata urutannya tidaklah seperti itu. Dalam hal ini Kratz tidak konsisten. Periksa misalnya artikel 7 ("Persatuan Indonesia" karya Sanusi Pane) dan artikel 8 ("Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru" karya Sutan Takdir Alisjahbana). Tulisan Sanusi Pane justru dalam konteks memberi tanggapan

Sejumlah masalah itu tentu saja tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kontribusi buku ini. Keseriusan Kratz dalam menghimpun serangkaian artikel dengan tema yang begitu beragam, menyodorkan banyak peluang bagi kita untuk melakukan penelitian lanjutan. Pemuatan empat artikel dari majalah *Pedoman Masyarakat* yang dipimpin Hamka, misalnya, menunjukkan bahwa Kratz tidak mengikuti *mainstream* sejarah kesusastraan Indonesia yang selama ini telah baku diajarkan di sekolah-sekolah. Kesusastraan Indonesia pada dasawarsa 1930-an jelas tidak hanya terpusat pada majalah *Poedjangga Baroe*, melainkan juga majalah lain yang terbit waktu itu, termasuk *Pedoman Masyarakat* terbitan Medan. Secara tersirat, Kratz terkesan hendak menawarkan keberadaan sastra di luar Balai Pustaka yang waktu itu semarak dengan Medan sebagai salah satu pusatnya.

Untuk periode zaman Jepang, Kratz memilih tiga artikel yang dimuat *Keboedajaan Timoer, Djawa Baroe*, dan *Pandji Poestaka*, meskipun artikel lain yang lebih mewakili cukup berlimpah pada masa itu, terutama yang dimuat harian *Asia Raja* (1942–5). Setidaknya ketiga artikel itu memberi gambaran bagaimana sikap para pengarang kita dalam berhadapan dengan kebijaksanaan Jepang di bidang kebudayaan. Malah, jika dimaksudkan untuk memberi gambaran keadaan kesusastraan zaman Jepang, tulisan H. B. Jassin “Kesusastraan di Zaman Jepang”⁹ sebenarnya jauh lebih representatif.

Mewakili perdebatan Angkatan 45, Kratz menampilkan delapan artikel. Sayangnya, artikel Chairil Anwar, “Angkatan 45” tidak dimasukkan dalam buku ini.¹⁰ Padahal, artikel itu dimuat bersamaan dengan artikel Sitor Situmorang, “Angkatan 45” (*Siasat*, 6 November 1949). Dalam artikel itu, Chairil menegaskan, antara lain,

Angkatan 1945 harus merapatkan barisanja dan berusaha sekeras2nja untuk menegakkan selfrespect dan melaksanakan selfhelp. Pertjaja pada diri sendiri dan berusaha meneguhkan ikatan-sosial dikalangan bangsa Indonesia.

Sutan Takdir Alisjahbana). Tulisan Sanusi Pane justru dalam konteks memberi tanggapan atas tulisan Alisjahbana. Jadi, mestinya tulisan Sanusi Pane diurutkan setelah tulisan Alisjahbana, bukan sebaliknya. Kasus serupa terjadi juga pada pemuatan artikel 89 (“Angkatan 80 dalam Sastra Indonesia” karya Korrie Layun Rampan) dan artikel 90 (“Angkatan 70 dalam Sastra Indonesia” karya Abdul Hadi WM). Atas dasar apa artikel Korrie ditempatkan lebih awal dari artikel Abdul Hadi tidak ada penjelasannya.

⁹ Lihat H. B. Jassin, (1954; h. 74–85. Artikel ini bertarikh 31 Juli 1946; artikel yang sama dengan penambahan mengenai Chairil Anwar dijadikan sebagai “Pendahuluan” buku Jassin, *Kesusasteraan Indonesia dimasa Djepang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1948; Cet. II, 1954), h. 1–27. Dengan demikian, untuk memberi “potret” kesusastraan Indonesia pada zaman Jepang, artikel Jassin itu mestinya menjadi bahan pertimbangan yang serius.

¹⁰ Lihat Chairil Anwar (1949). Jika benar artikel ini tulisan Chairil Anwar, maka itulah karya terakhirnya yang dipublikasikan 7 bulan setelah kematiannya, 28 April 1949.

Jadi, artikel itu sedikitnya memberi penegasan pada sikap Chairil Anwar dalam melihat semangat Angkatan 45. Mengingat Chairil Anwar termasuk salah satu tokoh kunci Angkatan 45, maka amat disayangkan jika sikap dan pandangannya mengenai Angkatan 45 yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan (kebudayaan dan kesusastraan) bangsa ini, dilewatkan begitu saja.

Meskipun demikian, ke-8 artikel itu representatif mengangkat simpang-siur gagasan tentang konsepsi estetik-kultural yang melandasi sikap Angkatan 45. Salah satu artikel penting dalam pembicaraan Angkatan 45 adalah tulisan Rosihan Anwar, "Angkatan 1945 buat Martabat Kemanusiaan" yang dimuat *Siasat*, 2, 1948. Penting lantaran menurut banyak sumber, Rosihan Anwar yang pertama melansir penamaan Angkatan 45.¹¹ Di sana juga ada artikel Jogaswara (Klara Akustia) "Angkatan 45 Sudah Mampus" yang kelak jadi polemik berkepanjangan dua kubu: humanisme universal dan realisme sosialis (Lekra).

Beberapa artikel lain mengenai Angkatan 45 sampai ke tulisan Jassin, "Angkatan 45" (*Zenith*, 3, 15 Maret 1951), sesungguhnya masih seputar perdebatan konsepsi dan penamaan Angkatan 45. Sejumlah nama yang diusulkan waktu itu, antara lain, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Perang, Angkatan sesudah Perang, Angkatan sesudah Pujangga Baru, Generasi Gelanggang, dan Angkatan Pembebasan. Yang kemudian diterima adalah penamaan Angkatan 45. Sampai awal tahun 1960-an, polemik itu melebar menjadi konflik ideologis antara sastrawan Lekra dan para penanda tangan Manifes Kebudayaan. Jika ditarik benang merahnya, berbagai gagasan itu mesti dilengkapi pula

¹¹ Lihat H. B. Jassin (1954; h. 189). Tulisan Jassin ini mula-mula dimuat dalam majalah *Zenith*, 3, 15 Maret 1951. Para pengamat umumnya mengutip artikel Jassin yang dimuat dalam buku yang terbit tahun 1954. Mereka yang mengutip artikel Jassin itu, antara lain, A. Teeuw (*Sastra Baru Indonesia* 1, Ende: Nusan Indah, 1980, h. 169), Keith Foulcher, *Angkatan 45: Sastra Politik Kebudayaan dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1994). Tulisan ini dengan perubahan di sana-sini, termasuk judulnya menjadi "Angkatan '45 dan Warisannya: Seniman Indonesia sebagai Warga Masyarakat Dunia" kemudian dimuat dalam *Asrul Sani 70 Tahun* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), h. 85–114; Pamusuk Eneste, *Leksikon Kesusastraan Indonesia Modern* (Jakarta: Djambatan, 1990), h. 20. Semua sumber itu menyebutkan bahwa penamaan Angkatan yang mula dilansir Rosihan Anwar itu dimuat dalam majalah *Siasat*, 9 Januari 1949. Sementara Ajip Rosidi menyebutkan bahwa penamaan yang dilakukan Rosihan Anwar pertama kali pada tahun 1948. Dengan adanya artikel Rosihan Anwar itu, maka sangat mungkin penyebutan Angkatan 45 pertama kali dimuat dalam majalah *Siasat*, 2, 1948, dan bukan tahun 1949 sebagaimana yang dinyatakan dalam sumber-sumber tersebut, termasuk yang dikemukakan H. B. Jassin.

"Mukaddimah Lekra", lalu "Surat Kepercayaan Gelanggang" dan belakangan "Manifes Kebudayaan".¹²

Dasawarsa 1950-an merupakan masa yang paling demokratis, dan mulai kacau saat memasuki tahun 1960-an. Perdebatan dan polemik terbuka yang menyangkut masalah sosial, politik, kebudayaan, termasuk sastra, hampir setiap hari menghiasi lembaran majalah atau surat kabar yang terbit waktu itu. Masalah yang jadi bahan perdebatan pun sangat beragam, mulai soal konsepsi estetik, fungsi sastra, tugas seniman, sastra populer, gagasan Angkatan Terbaru, sampai ke masalah hubungan sastra, ideologi, dan politik. Artikel-artikel yang dipilih Kratz cukup mewakili gambaran situasi sastra Indonesia masa itu, meski artikel-artikel dari kelompok sastrawan Lekra yang banyak menghiasi *Zaman Baroe*, *Bintang Timur*, *Harian Rakjat*, tidak dimasukkan dalam buku ini. Padahal, jika memang Kratz hendak menyusun sumber terpilih sejarah sastra Indonesia abad ke-20, artikel dari golongan Lekra yang pernah dimuat dalam media-media massa itu sangat penting untuk melihat sikap dan pandangan ideologis sastrawan Lekra yang kemudian menjadi alat ukur mereka untuk mendengarkan gagasan realisme sosialisnya.

Memasuki zaman Orde Baru, kesusastraan Indonesia, di satu pihak memunculkan begitu banyak karya eksperimental, dan di lain pihak mendapat pengekanan terutama terhadap para sastrawan garis merah. Mereka yang dianggap musuh oleh golongan Lekra justru bersuara lantang menentang pelarangan buku-buku yang dilakukan pemerintah. Tetapi belakangan, ketika Pramodya memperoleh hadiah Magsaysay, pembelaan itu malah jadi kontroversi. Jika kemudian muncul tanggapan pro dan kontra mengenai kepatutan atau ketidakpatutan Pramodya memperoleh hadiah itu, masing-masing mempunyai argumennya sendiri. Secara tersirat, kontroversi itu merupakan pertanda bahwa konflik ideologi yang terjadi tahun 1965-an antara para penanda tangan Manifes Kebudayaan dengan golongan sastrawan Lekra, belum berakhir. Sementara itu, arus eksperimentasi terus bergulir sampai tahun 1980-an. Abdül Hadi dan Korrie mencoba memberi label dengan nama Angkatan 70 dan Angkatan 80. Di luar itu, berbagai gagasan terus bermunculan

¹² Kratz mengurutkan teks-teks itu sebagai berikut: "Surat Kepercayaan Gelanggang" (artikel ke-27), "Mukadimah Lekra" (artikel ke-49), dan artikel ke-64, 65, dan 66 adalah "Sejarah Lahirnya Manifes Kebudayaan", "Penjelasan Manifes Kebudayaan" dan "Manifes Kebudayaan". Sesungguhnya, publikasi "Mukadimah Lekra" (Agustus 1950) mendahului publikasi "Surat Kepercayaan Gelanggang" bertarikh 18 Februari 1950, tetapi baru dipublikasikan dalam *Siasat*, 22 Oktober 1950. Jadi atas dasar apa Surat Kepercayaan Gelanggang ditempatkan lebih awal daripada Mukadimah Lekra. Kemudian mengenai Manifes Kebudayaan, mengapa pula sejarah dan penjelasannya harus ditempatkan lebih dahulu dari Manifes Kebudayaan itu sendiri Kratz tidak menjelaskan masalah ini.

menyemarakkan karya-karya yang terbit masa itu sampai ke persoalan Pram tadi.

Beberapa catatan yang dikemukakan dalam tinjauan ini tentu saja tidak mengurangi kontribusi buku ini sebagai sumber penting dalam penelusuran berbagai gagasan yang pernah mewarnai dinamika perjalanan kesusastraan Indonesia. Oleh karena itu, sungguh *Sumber Terpilih* yang disusun Kratz ini menawarkan berbagai pemikiran yang niscaya dapat menjadi sumber tulisan atau penelitian berikutnya. Masalahnya tinggal bagaimana kita memanfaatkan berbagai gagasan berharga itu untuk turut serta menyemarakkan dan memperkaya dinamika perjalanan kesusastraan Indonesia.

DAFTAR ACUAN*

- Anwar, Chairil (1949), "Angkatan 45," *Gelombang*, 6 November.
- Hutomo, Suripan Sadi (1995), *Wajah Sastra Indonesia di Surabaya 1856 – 1994*. Surabaya: Pusat Dokumentasi Sastra Suripan Sadi Hutomo.
- Jassin, H. B. (1948), *Kesusastraan Indonesia Dimasa Jepang*. Jakarta: Bali Pustaka (cet. II 1954).
- (1954), *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay*. Jakarta: Gunung Agung.
- Marcus A. S. dan Pax Benedanto (2000), *Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nio Joe Lari (1962), *Sastra Indonesia-Tionghoa*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rosidi, Ajip (1985), *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* Jakarta: Gunung Agung.
- Salmon, Claudine (1985), *Sastra Cina Peranakan dalam Bahasa Melayu*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryadinata, Leo (peny.) (1996), *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

* Tidak termasuk beberapa judul tulisan yang telah disebutkan secara lengkap dalam catatan kaki.